

## Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kerja Sama Daerah sebagai Upaya Sinkronisasi Program Misi Dagang dan Sinergi Lintas Instansi

Regina Yuniar<sup>1</sup>, Achmad Hairudin<sup>2</sup>, Agus Satrya Wibowo<sup>3</sup>, Theresia Octaviani<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Palangka Raya<sup>1,3,4,5</sup>  
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah<sup>2</sup>  
e-mail: [regina.yuniar2005@gmail.com](mailto:regina.yuniar2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [pahai1970@gmail.com](mailto:pahai1970@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[agus.wibowo@feb.upr.ac.id](mailto:agus.wibowo@feb.upr.ac.id)<sup>3</sup>, [theresia.octaviani@feb.upr.ac.id](mailto:theresia.octaviani@feb.upr.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Misi Dagang dan Investasi Jatim-Kalteng 2026 di Palangka Raya menjadi momentum strategis memperkuat sinergi ekonomi antarprovinsi. Pengabdian ini menganalisis peran tata kelola administrasi sebagai kunci keberhasilan kerja sama lintas wilayah melalui metode observasi partisipatif dan analisis dokumen secara kualitatif-deskriptif. Hasil kegiatan mencatat transaksi dan komitmen investasi mencapai lebih dari Rp2,082 triliun di sektor peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri olahan. Kesuksesan ini ditopang oleh instrumen hukum yang kuat seperti MoU, PKS, dan notulen rapat sebagai dasar akuntabilitas. Kegiatan ini menghasilkan draf panduan dokumentasi administratif untuk penguatan kapasitas kelembagaan. Temuan menegaskan bahwa capaian ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui tata kelola yang terstruktur, tertib, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Misi dagang, Investasi, Kerja Sama Antarprovinsi, Tata Kelola Administrasi, Pengabdian Masyarakat.*

### Abstract

The East Java-Central Kalimantan Trade and Investment Mission 2026 in Palangka Raya served as a strategic momentum to strengthen inter-provincial economic synergy. This study analyzed the role of administrative governance as the key to successful regional cooperation, utilizing participatory observation and qualitative-descriptive document analysis. The event recorded transactions and investment commitments exceeding IDR 2,082 trillion across livestock, agriculture, fisheries, forestry, and processing industries. This achievement was supported by solid legal instruments such as MoUs, cooperation agreements, and meeting minutes as accountability foundations. This activity produced a draft administrative documentation guide to enhance institutional capacity. The findings confirm that sustainable economic achievements can only be realized through structured, orderly, and accountable governance.

**Kata Kunci:** *Trade Mission, Investment, Inter-Provincial Cooperation, Administrative Governance, Community Service.*

### PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah yang semakin matang, kerja sama antarprovinsi telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antardaerah. Kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama antarprovinsi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Tinambunan, 2022). Namun, keberhasilan kerja sama ini tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai transaksi, melainkan juga oleh kualitas tata kelola administrasi yang menyertainya.

Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur melalui Misi Dagang dan Investasi 2026 di Palangka Raya menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat sinergi ekonomi antardaerah. Kegiatan ini berhasil membukukan transaksi lebih dari Rp2,082 triliun (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, 2026), meliputi komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, hingga industri olahan, serta komitmen investasi jangka panjang di sektor strategis. Pencapaian serupa juga terlihat pada Misi Dagang tahun 2022 di Palangka Raya yang mencatat transaksi sebesar Rp293,59 miliar (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2022). Namun, keberhasilan jangka panjang dari kerja sama semacam ini mensyaratkan fondasi administrasi yang kokoh agar tidak berhenti pada tataran seremonial.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Kalimantan Tengah adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah dan lemahnya rantai pasok domestik. Sebaliknya, Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional membutuhkan pasokan bahan baku dari provinsi lain untuk menjaga keberlanjutan sektor industrinya. Di sinilah peran tata kelola administrasi menjadi krusial sebab dokumen resmi seperti Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang mengikat komitmen kedua belah pihak dan menjadi panduan implementasi di lapangan. Transparansi dalam administrasi pemerintahan mencakup keterbukaan atas proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk sistem informasi yang tersistematis sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Trisakti et al., 2021).

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya dimensi administrasi ini. Prabowo dan Rafli (2022) menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama antardaerah dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola dan mekanisme pelaksanaan kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Senada dengan itu, Prasojo dan Kurniawan (2020) menekankan bahwa kapasitas birokrasi dalam mengelola dokumen kerja sama secara transparan merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Sementara itu, dalam konteks kerja sama antardaerah, kegagalan implementasi kesepakatan sering kali terjadi ketika tahapan pascapenandatanganan MoU tidak ditindaklanjuti secara konsisten, karena tidak adanya kegiatan nyata setelah penandatanganan merupakan salah satu penyebab utama kerjasama tidak berjalan efektif (Safitri et al., 2023).

Sebagai mahasiswa magang di Biro Pemerintahan Bagian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penulis terlibat langsung dalam proses dokumentasi misi dagang ini, mulai dari pencatatan notulen rapat persiapan, pengantaran surat resmi antar instansi, hingga dokumentasi visual pada acara penandatanganan MoU. Keterlibatan ini memberikan sudut pandang unik untuk mengkaji bagaimana praktik administrasi sehari-hari berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kerja sama antarprovinsi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Biro Pemerintahan Bagian Kerja Sama Provinsi Kalimantan Tengah melalui keterlibatan langsung dalam rangkaian persiapan dan pelaksanaan misi dagang dan investasi kalteng-jatim 2026. Penulis mendampingi proses tata kelola administrasi sekaligus melakukan transfer pengetahuan kepada staf mengenai mekanisme koordinasi lintas OPD yang tertib dan terdokumentasi. Dari keseluruhan proses tersebut dihasilkan draf panduan praktis dokumentasi administratif kerja sama antarprovinsi sebagai luaran yang dapat langsung dimanfaatkan oleh instansi mitra. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, tetapi juga meninggalkan kontribusi kelembagaan yang nyata dan berkelanjutan bagi penguatan kapasitas administrasi pemerintah daerah.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan dua metode utama, yaitu observasi partisipatif terbatas dan analisis dokumen administratif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis memahami dinamika proses administrasi secara mendalam dari perspektif *insider*, sekaligus menghasilkan deskripsi yang kaya tentang mekanisme kerja sama antarprovinsi (Sugiyono, 2019).

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah rapat persiapan pada 13 Maret 2026 yang dilaksanakan melalui Zoom di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dihadiri oleh beberapa OPD. Penulis bertugas membuat notulen rapat yang mencakup data pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 4,8% (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2026) dan Jawa Timur sebesar 5,33% (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2024), serta pola perdagangan antarprovinsi dan evaluasi misi dagang sebelumnya.



Gambar 1. Rapat Persiapan Misi Dagang Kalteng-Jatim melalui Zoom, 13 Maret 2026  
(Dokumentasi Pribadi)

Tahap kedua adalah koordinasi administratif pada 25-31 Maret 2026, mencakup pengantaran surat undangan resmi, pencatatan notulen rapat lanjutan yang membahas draft PKS dan MoU bersama sembilan OPD, serta penyampaian surat Gubernur Jawa Timur untuk proses penandatanganan.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Lintas OPD Penelaahan Draft PKS, 30 Maret 2026  
(Dokumentasi Pribadi)

Tahap ketiga adalah dokumentasi acara puncak pada 23 April 2026 di Hotel Bahalap, Palangka Raya, di mana penulis mendokumentasikan penandatanganan MoU dan PKS oleh Gubernur kedua provinsi. Tahap keempat adalah analisis dan perumusan panduan, yakni menganalisis seluruh dokumen secara kronologis-tematik untuk mengidentifikasi pola tata kelola yang efektif.

Sumber data primer meliputi notulen rapat, dokumen MoU dan draft PKS, surat-surat resmi, serta dokumentasi foto. Sumber data sekunder meliputi literatur akademik tentang tata kelola administrasi, kerja sama antardaerah, dan data statistik pertumbuhan ekonomi kedua provinsi.

Tahap kelima adalah pendampingan dan transfer pengetahuan kepada staf Biro Pemerintahan Bagian Kerja Sama. Selama periode magang, penulis melakukan beberapa kegiatan pengabdian langsung kepada pegawai, yaitu: pertama, menjelaskan dan mendampingi staf dalam menyusun notulen rapat yang terstruktur sesuai standar dokumentasi administratif; kedua, membantu pegawai menyusun dan merapikan arsip dokumen kerja sama secara kronologis (waktu-tempat); serta ketiga berbagi pengetahuan mengenai format dokumen kerja sama antarprovinsi yang komprehensif. Seluruh kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada staf Biro Pemerintahan Bagian Kerja Sama dalam suasana kerja sehari-hari, sehingga transfer pengetahuan berlangsung secara sesuai kebutuhan dan aplikatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendampingan Administrasi Kerja Sama Antardaerah**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui keterlibatan langsung penulis sebagai mahasiswa magang pada Biro Pemerintahan Bagian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangkaian persiapan dan pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi Kalteng-Jatim 2026. Bentuk pengabdian yang dilakukan tidak hanya berupa bantuan administratif, tetapi juga pendampingan teknis sederhana kepada staf dalam pengelolaan dokumen kerja sama agar lebih sistematis, tertib, dan mudah ditelusuri kembali.

Selama kegiatan berlangsung, penulis membantu proses penyusunan notulen rapat, pengarsipan dokumen kerja sama, pengelompokan surat resmi, hingga dokumentasi kegiatan penandatanganan MoU dan PKS. Pendampingan dilakukan secara langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara praktis dan aplikatif sesuai kebutuhan instansi.

Kegiatan pendampingan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kerapian administrasi dan kesinambungan dokumentasi kerja sama antarprovinsi. Sebelum dilakukan pendampingan, beberapa dokumen masih tersimpan secara terpisah dan belum tersusun berdasarkan tahapan kegiatan. Setelah dilakukan penataan ulang, dokumen rapat, surat menyurat, draft PKS, dan dokumentasi kegiatan dapat diarsipkan secara kronologis sehingga lebih mudah digunakan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kerja sama.

Pendampingan ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebagai peserta magang yang belajar dari instansi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat akademik yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, mahasiswa berupaya membantu menciptakan tata kelola administrasi yang lebih tertib dan efektif demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

### **Penguatan Kapasitas Administratif Melalui Transfer Pengetahuan**

Selain membantu pekerjaan administratif, penulis juga melakukan berbagi pengetahuan kepada staf mengenai pentingnya tata kelola dokumen dalam kerja sama daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi informal selama proses kerja berlangsung, terutama terkait penyusunan notulen rapat yang terstruktur, pencatatan hasil koordinasi lintas OPD, serta penyusunan arsip dokumen kerja sama berdasarkan waktu dan jenis kegiatan.

Pendampingan tersebut membantu staf memahami bahwa dokumen administrasi bukan sekadar pelengkap kegiatan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan implementasi kerja sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasojo dan Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola administrasi yang transparan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar dari instansi, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung peningkatan kapasitas administrasi mitra secara sederhana namun nyata.

### **Kontribusi Tata Kelola Administrasi terhadap Keberhasilan Misi Dagang**

Keberhasilan Misi Dagang dan Investasi Kalteng–Jatim 2026 yang menghasilkan transaksi dan komitmen investasi lebih dari Rp2,082 triliun (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, 2026), menunjukkan bahwa kerja sama antardaerah memerlukan dukungan administrasi yang tertib dan terkoordinasi dengan baik. Dalam konteks inilah peran pendampingan yang dilakukan penulis selama magang menjadi relevan: notulen rapat yang penulis susun secara terstruktur, arsip dokumen yang ditata ulang secara kronologis, dan distribusi surat resmi yang tertib turut berkontribusi dalam menjaga kesinambungan komunikasi antarinstansi selama rangkaian persiapan berlangsung.

Kegiatan administrasi seperti penyusunan notulen, penelaahan draft PKS, distribusi surat resmi, dan dokumentasi kegiatan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi antarinstansi. Rangkaian dokumentasi yang tersusun sejak rapat persiapan hingga pelaksanaan kegiatan menciptakan jejak administrasi yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut program kerja sama. Keterlibatan langsung penulis dalam menyusun dan merapikan dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa mahasiswa magang dapat berperan bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan sebagai kontributor aktif dalam penguatan tata kelola administrasi instansi mitra. Dengan demikian, tata kelola administrasi berfungsi tidak hanya sebagai kebutuhan formal birokrasi, tetapi juga sebagai alat pendukung efektivitas implementasi kerja sama daerah.



Gambar 3. Penandatanganan MoU dan PKS oleh Gubernur Jatim dan Kalteng, 23 April 2026 (Dokumentasi Pribadi)

### Hambatan dan Tantangan Administratif

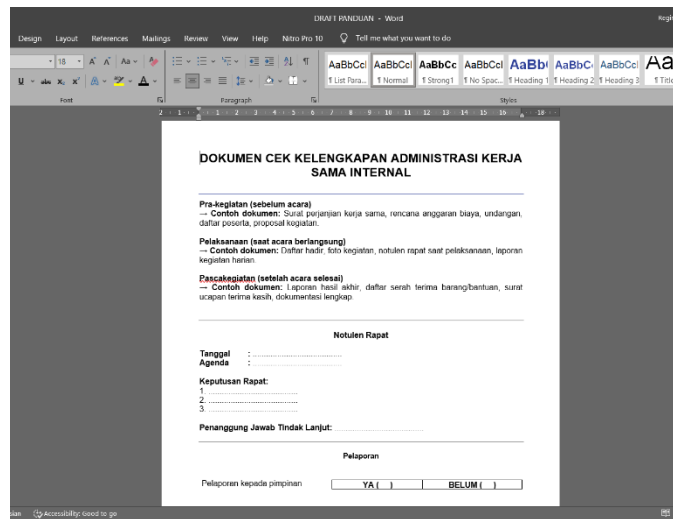
Meskipun secara umum proses administrasi berjalan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diidentifikasi. Pertama, jarak waktu antara penandatanganan MoU dan penyusunan PKS yang lebih teknis cukup panjang, berpotensi menimbulkan kekosongan panduan implementasi di tingkat operasional. Kedua, mekanisme monitoring pascakegiatan belum terdokumentasikan secara eksplisit, sehingga sulit mengukur tingkat realisasi komitmen yang telah disepakati. Ketiga, koordinasi antara Biro Pemerintahan dengan OPD teknis terkadang masih bersifat reaktif daripada proaktif. Kurang optimalnya proses persiapan internal dan tidak diterapkannya tahapan administratif secara menyeluruh dapat menyebabkan kerja sama daerah berjalan tidak efektif dan manfaatnya menjadi kurang maksimal (Rumansi et al., 2023).

### Luaran Pengabdian

Sebagai luaran konkret dari rangkaian kegiatan pendampingan, penulis merumuskan draf panduan dokumentasi administratif kerja sama. Draft ini tidak disusun secara sepihak, melainkan lahir dari proses diskusi dan berbagi pengetahuan bersama staf Biro Pemerintahan selama periode magang berlangsung. Panduan terdiri dari tiga komponen utama: pertama, standar minimum dokumen yang harus disiapkan dalam setiap tahap kerja sama (pra-kegiatan, pelaksanaan, dan pascakegiatan); kedua, *template* notulen rapat yang mencakup informasi wajib yaitu tanggal, peserta, agenda, keputusan, dan penanggung jawab tindak lanjut; dan ketiga, mekanisme pelaporan berkala kepada pimpinan untuk memastikan kesinambungan implementasi.

Draf panduan ini kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama staf serta Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sebelum secara resmi diserahkan sebagai bahan pertimbangan pengembangan SOP internal. Proses diskusi ini menghasilkan masukan dari pegawai yang memperkaya isi panduan dan sekaligus memastikan bahwa panduan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan

demikian, luaran pengabdian ini bukan sekadar dokumen akademik, melainkan produk kolaboratif yang berakar pada praktik kerja nyata di instansi mitra.



Gambar 4. Draf panduan dokumentasi administratif kerja sama (Dokumentasi Pribadi)

## SIMPULAN

Kegiatan Misi Dagang dan Investasi Kalteng-Jatim 2026 membuktikan bahwa kerja sama antarprovinsi yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan pelaku usaha dan penandatanganan dokumen. Di balik capaian ekonomi senilai Rp2,082 triliun (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, 2026), terdapat fondasi tata kelola administrasi yang dibangun secara sistematis melalui serangkaian rapat persiapan, koordinasi lintas OPD, dan dokumentasi yang konsisten selama lebih dari satu bulan. Tiga pilar administrasi yang diidentifikasi dengan kelengkapan dokumen hukum, koordinasi lintas OPD yang terstruktur, dan kesinambungan dokumentasi kronologis yang terbukti saling melengkapi dan memperkuat keberhasilan kegiatan, mengonfirmasi pandangan Prabowo dan Rafli (2022) serta Safitri et al., (2023) bahwa efektivitas tata kelola administrasi dan mekanisme pelaksanaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan kerja sama antardaerah.

Keterlibatan penulis sebagai mahasiswa magang menghasilkan luaran berupa draf panduan dokumentasi yang dapat menjadi referensi bagi Biro Pemerintahan dalam mengelola kerja sama antarprovinsi di masa mendatang. Untuk ke depannya, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi untuk memastikan realisasi komitmen dalam MoU dan PKS, pembakuan *template* dokumen administrasi kerja sama agar tidak bergantung pada individu tertentu, serta penguatan mekanisme koordinasi proaktif antar-OPD jauh sebelum kegiatan berlangsung. Sehingga capaian ekonomi dalam kerja sama antarprovinsi hanya dapat berkelanjutan apabila didukung oleh tata kelola administrasi yang terstruktur, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026). *Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Tumbuh 4,80 Persen*. Diunduh dari <https://kalteng.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1622/ekonomi-kalimantan-tengah-tahun-2025-tumbuh-4-80-persen.html> tanggal 30 April 2026.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2024). *BPS Jatim Catat Pertumbuhan Ekonomi 2019–2023*. Diunduh dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bps-jatim-catat-pertumbuhan-ekonomi-2019-2023> tanggal 30 April 2026.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. (2026). *Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang Jatim–Kalteng Catat Transaksi Rp 2,082 Triliun Lebih, Perkuat Integrasi Pasar Domestik Serta Rantai Pasok Antarwilayah*. Diunduh dari <https://diskopukm.jatimprov.go.id/id/berita/gubernur-khofifah-pimpin-misi-dagang-jatim-kalteng-catat-transaksi-rp-2082-triliun-lebih-perkuat-integrasi-pasar-domestik-serta-rantai-pasok-antarwilayah> tanggal 10 Mei 2026.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2022). *Transaksi Misi Dagang Provinsi Jawa Timur–Provinsi Kalteng Tembus 293,59 Miliar Rupiah*. Diunduh dari <https://kalteng.go.id/berita/read/2752/transaksi-misi-dagang-provinsi-jawa-timur-provinsi-kalteng-tembus-293-59-miliar-rupiah> tanggal 10 Mei 2026
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20-28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi birokrasi dan good governance: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 1-11. Diunduh dari: <https://reformasibirokrasijabar.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/10/rb-dan-good-governance-eko-p.pdf> tanggal 29 April 2026.
- Rumansi, M. S., Sondakh, J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian yuridis tahapan penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 254–263. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.363>
- Safitri, N., Syafira, S. P., & Kurniawati, D. E. (2023). Analisa faktor penyebab kegagalan sister cities di Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 56–68. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2016>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 2)*. Bandung: Alfabeta.
- Tinambunan, W. D. (2022). Implementasi penyelenggaraan kerjasama wajib antar daerah dalam kerangka otonomi daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 123–143.
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.61>